



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).

A. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Daya beli).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2024 sebesar 74.04% dan tahun 2025 sebesar 74,79 dengan perubahan sebesar 0,75%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros Tahun 2024 – 2025

KOMPONEN IPM	TAHUN		Perubahan %
	2024	2025	
Angka Harapan Hidup	73,77	74,10	0,33
Rata-rata Lama Sekolah	8,05	8,20	0,15
Harapan Lama Sekolah	13,51	13,52	0,01
IPM	74,04	74,79	0.75

Sumber : BPS dan Bapperida Kab. Maros, 2026

B. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2024 sebesar 9,65 persen dan tahun 2025 sebesar 8,90 persen dengan perubahan sebesar 0,75%.

Pencapaian Angka Kemiskinan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Angka Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2024 – 2025

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2024	2025	
Angka Kemiskinan %	9,65	8,90	0,75%

Sumber : BPS dan Bapperida Kab. Maros, 2026

Kinerja penanggulangan kemiskinan ini masih menjadi target dan upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah sehingga dapat menekan angka kemiskinan kedepannya. Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

C. Angka Pengangguran

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak

terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Angka Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 2024 sebesar 4,34% dan pada tahun 2025 sebesar 4,13% dengan perubahan sebesar 0,21%. Pencapaian Pengangguran di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Pengangguran Kabupaten Maros
Tahun 2024 – 2025**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2024	2025	
Angka Pengangguran %	4,34	4,13	0,21%.

Sumber : BPS dan Bapperida Kab. Maros, 2026

D. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros mengalami penurunan yang cukup signifikan . Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yakni 3,79% namun pada tahun 2025 mengalami perlambatan dengan capaian 4,24% atau dengan perubahan sebesar 0,45%.

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
Tahun 2024 – 2025**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2024	2024	
Pertumbuhan Ekonomi %	3,79	4,24	0,45%

Sumber : BPS dan Bapperida Kab. Maros, 2026

E. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2024 PDRB perkapita sebesar 69,21% dan terakhir pada tahun 2025 sebesar 71,36% yang artinya bahwa kondisi kemakmuran Masyarakat mengalami tren penurunan namun masih dalam kondisi yang terkendali.

Pencapaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**PDRB Perkapita Tahun 2024-2025
Kabupaten Maros**

Uraian	2024	2025	Perubahan %
Nilai PDRB (Triliun Rp.)	28,62	29,91	
Jumlah Penduduk (jiwa)	423,99	424,60	
PDRB perkapita (Juta Rp/ Jiwa)	69,21	71,36	2,15%

Sumber : BPS dan Bapperida Kab. Maros, 2026

F. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Maros berada pada ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 2024 sebesar 0,363% dan tahun 2025 sebesar 0,335% dengan perubahan sebesar 0,028%.

Pencapaian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Maros
Tahun 2024 – 2025**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2024	2025	
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) %	0,363	0,335	0,028%

Sumber : BPS dan Bapperida Kab. Maros, 2026

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepadapemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2025, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

2.1. URUSAN PENDIDIKAN

A. CAPAIAN KINERJA OUTCOME

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada tahun 2025 berdasarkan indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4		
1	PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di <u>satuan PAUD</u> Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	X100%	96,68 %
			<u>15.868</u> 16.413	X100%	
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang belajar di <u>sekolah dasar</u> Jumlah anak usia 7-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	X100%	99,86%
			<u>69.958</u> 70.058	X100%	
		Persentase Anak Usia 7 s.d. 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam <u>pendidikan kesetaraan</u> Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	X100%	100%
			<u>252</u>	X100%	

			252	
	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar dan Sekolah Pertama yang <u>Kondisi baik</u> Jumlah Seluruh Toilet	X100%	66,38%
		<u>683</u> 1.029		
	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama <u>dalam kondisi baik</u> Jumlah Ruang Kelas	X100%	63,11%
		<u>1.649</u> 2.613	X100%	

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2025 sebesar **Rp. 497.244.400.992** dan terealisasi sebesar **Rp. 473.080.834.582** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pendidikan Anak Usia Dini	18.088.454.000	17.016.451.116	94,07	APBD
2	Pendidikan Dasar	116.418.818.156	109.995.264.488	94,48	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	1.907.655.000	128.371.903.477	71,30	APBD
Total Anggaran SPM		136.414.927.156	128.371.903.477	94,10	
Total Anggaran PD		497.244.400.992	473.080.834.582	95,14	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		27,43	27,14		

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan
1.	Pengumpulan Data	Masih belum tersedianya data Anak Tidak Sekolah yang akurat Belum maksimalnya Sistem Pendataan Anak Tidak Sekolah Adanya perbedaan data dari beberapa Indikator
2.	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan biaya pendidikan yang harus disesuaikan perangkat daerah Perhitungan kebutuhan penanganan sosial bagi anak putus sekolah belum memadai
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan anak tidak sekolah
4.	Pelaksanaan	Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah / lokasi pemenuhan
5.	Lain-lain	

2.2. URUSAN KESEHATAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada Tahun 2025 berdasarkan indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	
2	KESEHATAN	Persentase Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Tahun N}}{\text{Jumlah Ibu melahirkan Tahun N}} \times 100\%$ $\frac{5}{5.048} \times 100\%$	0,09 %
		Prevalensi Stunting	Jumlah balita umur 0	

(Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu		
	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	X100%	13,66%
	3.721	X100%	
	13.231		
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu <u>tahun (nominator)</u> Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X100%	
	$\frac{5.408}{5.408}$	X100%	
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun		
	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama		
	5.408		

	5.408		
Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	X100%	100%
	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X100%	
	<u>5.385</u> 5.385		
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	X100%	100%
	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	X100%	
	<u>27.504</u> 27.504		
Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	X100%	100%
	Jumlah semua anak usia		

	<p>pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama</p> $\frac{54.559}{54.559} \times 100\%$	
<p>Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar</p>	<p>Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	<p>100%</p>
	<p>Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{179.986}{179.986} \times 100\%$	
<p>Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</p>	<p>Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)</p>	<p>79,99 %</p>
	<p>Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)</p> $\frac{30.358}{30.358} \times 100\%$	
	<p>30.358</p>	

	<p>Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar</p>	<p>Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p>	
		<p>Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>X100%</p>
		<p><u>11.568</u></p> <p>11.568</p>	<p>X100%</p>
	<p>Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar</p>	<p>Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p>	<p>63,87 %</p>
		<p>Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	
	<p>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p>	<p>Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan</p>	<p>69,87 %</p>

jiwa sesuai standar	<p>elayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	
	<p>Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: center;"><u>943</u> 943</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	<p>Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</p>	100%
	<p>Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>5.001</u> 5.001</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	<p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	100%
	<p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/Kota di dalam kurun waktu satu tahun</p> <p style="text-align: center;"><u>6.030</u> 6.030</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Maros Tahun 2025 sebesar **Rp. 241.361.247.555** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.184.420.000	1.069.625.275	90,31	PAD, PBH-PR, DAK NF
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	462.940.000	100.828.000	21,78	PBH-PR, DAK NF
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	0	0	0	
4	Pelayanan kesehatan Balita	42.560.000	42.560.000	100	PBH-PR, DAK NF
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	719.702.700	719.702.700	100	PBH-PR, DAK NF
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	0	0	0	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	23.340.000	23.340.000	100	DAK NF
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	0	0	0	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	0	0	0	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	219.340.000	219.340.000	100	DAK NF
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	237.740.000	201.290.000	84,67	DAK NF
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	56.180.000	56.180.000	100	PAD, DAK NF

Total Anggaran SPM	2.946.222.700	2.423.865.975	82,57	
Total Anggaran OPD	241.361.247.555			

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Maros pada Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<p>Faktor Ekseternal: Data Sasaran SPM yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terdapat perbedaan (selisih) karena tidak semua penduduk yang memiliki KTP, memilih menetap di Kabupaten Maros sehingga mempengaruhi jumlah sasaran masyarakat yang akan dilayani sementara petugas kesehatan hanya akan melayani sesuai dengan data rill yang ditemukan di lapangan.</p> <p>Mobiliasasi penduduk yang sangat cepat, khususnya yang berada diantara perbatasan Maros-Makassar sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan data sasaran SPM.</p> <p>Faktor Internal: Konsisten para petugas kesehatan yang belum sepenuhnya tepat waktu karena dalam pengumpulan data masih seringkali terjadi perubahan data yang berulang-ulang.</p>	<p>Faktor Ekseternal: Dukungan dan peranan aktif dari pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam Percepatan Pelayanan SPM Bidang Kesehatan, Khususnya Pengaturan Mobilitas yang memiliki hak dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Faktor Internal: Peningkatan pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan kepada Puskesmas</p>
2.	Penghitungan Kebutuhan	Koordinasi terkait cara perhitungan Kebutuhan dengan Bidang Pengampu SPM dengan Bidang Lintas Program terkait Perhitungan kebutuhan untuk alat kesehatan, bahan habis medis pakai, obat, vaksin dan perlengkapan dalam pelayanan dasar kesehatan untuk SPM yang belum memiliki petunjuk teknis dalam	Peningkatan koordinasi Dinas Kesehatan pada setiap Bidang Pengampu SPM

		penghitungan kebutuhan sesuai standar.	
.3.	Perencanaan dan Penganggaran	Kegiatan pelaksanaan pelayanan dasar terkait SPM di Puskesmas belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintahan Daerah yang bersumber DAU sehingga kegiatan berjalan disuupporting oleh DAK Fisik dan Non Fisik berdasarkan menu yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI	Dukungan dan peranan aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan, Khususnya Penganggaran
4.	Pelaksanaan	Pelayanan kesehatan dasar belum terintegrasi dengan siklus hidup yang berdasarkan dengan indikator mutu SPM karena masih berdasarkan program layanan kesehatan saja.	Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan.
5.	Pelaporan	-	-

6.	Lain-lain	<p>Faktor Ekseternal: Dukungan dan peranan lintas sektor yang belum sepenuhnya aktif dalam peningkatan capaian pelayanan SPM.</p> <p>Deteksi dini/pemeriksaan awal yang masih kurang disadari oleh masyarakat akan pentingnya arti kesehatan.</p> <p>Faktor Internal: <i>Maintace</i> beberapa aplikasi Kementerian Kesehatan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penginputan pelaporan rutin setiap bulan.</p> <p>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas kesehatan yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian maksimal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Mobilisasi/perpindahan penduduk, khususnya yang usia kerja/produktif yang bersifat dinamis; aktiviatas/kesibukan penduduk yang bertepatan; Kondisi kehamilan yang mengalami Abortus/keguguran; kerjasama pihak-pihak guru di beberapa sekolah yang masih kurang aktif dalam jadwal pelayanan kesehatan; Belum semuanya masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses lokasi fasilitas kesehatan yang terdekat; Faktor sosial budaya bagi Sasaran/Populasi kunci pada indikator Orang yang terinfeksi HIV yang enggan untuk dilakukan Screening kesehatan karena jika hasil pemeriksaannya Positif maka mereka takut dijauhi masyarakat sehingga mempengaruhi pencapaian pelayanan SPM sesuai target SPM Sebesar 100%.</p>	Dukungan dan peranan aktif dari Pemeintah Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan.
----	-----------	--	---

2.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh kabupaten Maros pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	
3	PEKERJAAN UMUM	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik (Ha)}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$	0%
			$\frac{0}{6,459} \times 100\%$	
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)}}{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)}} \times 100\%$	68,19%
$\frac{844,62}{1.238,567} \times 100\%$				
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem}}{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem}} \times 100\%$	76,45 %

		Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kab/Kota	Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun N $X100\%$	
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Rumah di Kabupaten/Kota $X100\%$ $X100\%$	$97,54\%$
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha) $X100\%$	$3,78\%$

		<p>Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <p style="text-align: center;">180</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">4.758,525</p>	
	<p>Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	<p>0%</p>
		<p>Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)</p> <p style="text-align: center;">0</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">1</p>	
	<p>Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya</p> <p style="text-align: right;">X100%</p>	<p>100 %</p>
		<p>Jumlah Persetujuan bangunan gedung yang berlaku</p>	

			X100%	
			<u>804</u> 804	
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	<p>Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <hr/> <p>Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <p style="text-align: center;"> <u>24</u> 24 </p>	100 %
		Persentase Tenaga Operator /Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <p>Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam</p>	38,03%

			kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota <hr/> 694 X100% 1.825	
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun <hr/> Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun <hr/> 0 X100% 183	0%

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Maros Tahun 2025 sebesar **Rp. 122.606.146.164** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	10.254.510.000	8.695.739.642	84,80	APBD (DAU)
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	11.687.617.000	11.481.905.890	98,24	APBD (DAU)

Total Anggaran SPM	21.942.127.000	20.177.645.532	91,96	APBD (DAU)
Total Anggaran PD	122.606.146.164			
Persentase Alokasi Anggaran SPM			16,46	

Sumber data : Dinas PU, TR, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab.Maros, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Adanya perbedaan data pada saat di lapangan	Keakuratan data lapangan
2.	Penghitungan Kebutuhan	Kurangnya dokumen perencanaan pendukung dan tidak semua data dasar tersedia serta data cenderung kurang update	Data dasar tersedia
		Belum adanya data base keberfungsian dari sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun	Penyusunan data base keberfungsian sarana prasarana air minum dan sanitasi
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum optimalnya system perencanaan penyediaan air minum dan terbatasnya pendanaan untuk penerapan SPM	Perencanaan lebih dioptimalkan berbanding lurus dengan pendanaannya
		Perlunya penganggaran yang cukup besar untuk menuntaskan permasalahan air minum dan sanitasi	Anggaran bidang air minum dan sanitasi di optimalkan
4.	Pelaksanaan	Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah	Pelatihan untuk perangkat daerah
		Sarana prasarana bidang sanitasi belum berfungsi secara optimal	Pelatihan untuk kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi
		Pelaksanaan fisik dilaksanakan dilapangan mulai berjalan di bulan juni, sehingga realisasi penerapan SPM terlihat pada TW 3 dan TW 4	-
5.	Lain-lain	RAD belum dapat diimplementasikan mengingat sering terjadi perubahan kebijakan baik di pusat maupun di daerah	Dalam penganggaran kegiatan untuk program pendukung SPM lebih diprioritaskan
		Pengelolaan sarana air bersih maupun sarana sanitasi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak kelurahan/desa	

2.4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Maros Tahun 2025 berdasarkan Indeks Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	
4	PERUMAHAN RAKYAT	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N}} \times 100\%$	96,77%
			$\frac{90}{93} \times 100\%$	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani Tahun N}}{\text{Target Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha pada Tahun N}} \times 100\%$	0,00%
$\frac{0}{29,17} \times 100\%$				
			$\text{Jumlah Rumah yang tidak layak huni yang} \times 100\%$	96,77%

	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	tertangani pada tahun N <hr/> Jumlah Rumah tidak layak huni pada Tahun N	
		30 <hr/> 31	X100%
	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	X100%
		Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	
		0 <hr/> 1	X100%
			0%

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja urusan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Maros Tahun 2025 yang memuat urusan wajib standar pelayanan minimal sebesar **Rp. 360.721.000** dan terealisasi sebesar **Rp. 355.830.000** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Rp. 10.721.000	Rp. 5.830.000	54,38	APBD
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	100	APBD
Total Anggaran SPM		Rp. 360.721.000	Rp. 355.830.000	98,64	

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Sulitnya berkomunikasi dengan aparat desa Lokasi jauh Pengumpulan data ditingkat desa masih kurang	Meningkatnya komunikasi dengan aparat desa membentuk tim survey lokal (melibatkan perangkat desa atau kader lokal), menggunakan google form atau aplikasi pendataan berbasis digital untuk efisiensi atau menyusun jadwal kunjungan lapangan berdasarkan zonasi wilayah agar lebih efektif menyediakan format standar pengisian data (template baku)
2.	Penghitungan Kebutuhan	Data yang masuk Lebih Banyak dari pada rencana Realisasinya	Penetapan skala prioritas (membuat kriteria prioritas yang jelas tingkat urgensi, jumlah penerima mamfaat, dampak sosial)

		Perencanaan Pendataan lebih banyak dari pada usulan kegiatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan perencanaan tidak dapat terealisasi semua	Sinkronisasi antara pendataan dengan pagu anggaran dan rencana program
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Kurangnya anggaran pada kegiatan	Optimalisasi anggaran dengan cara menyesuaikan spesifikasi teknis agar tetap memenuhi standar namun lebih efisien
4.	Pelaksanaan	Pendistribusian Material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda	Strategi distribusi yang fleksibel sesuai kondisi lapangan

2.5. URUSAN KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	<p>Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N $\times 100\%$</p> <p>Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) = 3</p> <p>$\frac{1}{3} \times 100\%$</p>	33,33%
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	<p>Jumlah Perda/Perkada yang memuat <u>sanksi yang ditegakkan</u> $\times 100\%$</p> <p>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</p> <p>$\frac{47}{47} \times 100\%$</p>	100%
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	<p>Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang</p>	100%

	ditegakkan		
	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	X100%	
	45		
	45	X100%	
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X100%	82,33%
	Jumlah warga negara yang tinggal di Kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan		
	191	X100%	
	232		
Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%
	Jumlah warga negara yang menjadi korban Bencana	X100%	
	251		
	251	X100%	

	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap X100%		100%
		Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota		
		<u>81</u>	X100%	
		81		

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Maros Tahun 2025 sebesar Rp. **10.255.183.629** dan terealisasi sebesar Rp. **9.528.989.566** dengan Program/Kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	149.749.000	182.880 ,000	77 %	APBD dan Dana Bagi Hasil
2	Penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati	144.886.000	124.619.211	86 %	APBD
Total Anggaran SPM		294.635.500	142.907.211	48,49%	APBD dan Dana Bagi Hasil
Total Anggaran PD		10.255.183.629	9.528.989.566	92,91%	APBD dan Dana Bagi Hasil
Persentase Alokasi Anggaran SPM		0,145%	0,192%		APBD dan Dana Bagi Hasil

Sumber data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Tidak tersedianya data (tidak terdokumentasi secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat; Kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir;	Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal

2.	Penghitungan Kebutuhan	<p>Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;</p> <p>Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk memenuhi jasa tenaga honor</p> <p>Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Damkar masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, Maros Baru dan Mandai).</p>	<p>Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran;</p> <p>Mengajukan untuk melakukan pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;</p> <p>Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada penganggut petugas</p>
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<p>Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</p>	<p>Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;</p>
4.	Pelaksanaan	<p>Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;</p> <p>Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah</p>	<p>Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan trantibumlinmas;</p> <p>Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar</p>
5.	Pelaporan	-	-

2.6. URUSAN SOSIAL

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantardi luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\times 100\%$</p> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar di Daerah kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p> <p style="text-align: center;">$\frac{41}{41} \times 100\%$</p>	100%
		Persentase Anak terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<p>Jumlah Anak Terlantar di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\times 100\%$</p> <p>Populasi anak terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasiu sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen</p> <p style="text-align: center;">$\frac{74}{74} \times 100\%$</p>	100%
		Persentase Lanjut Usia terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<p>Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\times 100\%$</p>	100%

	<p>Populasi Lanjut Usia terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen</p> <p style="text-align: center;">17 17</p>	<p>X100%</p> <p>X100%</p>	
<p>Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	<p>Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>	<p>X100%</p>	
	<p>Populasi Gelandangan dan Pengemis di Daerah kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p> <p style="text-align: center;">60 60</p>	<p>X100%</p>	<p>100%</p>
<p>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>	<p>X100%</p>	<p>100%</p>
	<p>Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota</p> <p style="text-align: center;">186.908 186.908</p>	<p>X100%</p>	
<p>Persentase Penerima Manfaat Yang</p>	<p>Jumlah Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</p>	<p>X100%</p>	

	Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin, dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah Kabupaten/Kota	100%	
		38.681		X100%
		38.681		

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi Belanja Urusan Sosial di Kabupaten Maros Tahun 2024 sebesar Rp. **17.472.261.758** dan terealisasi sebesar Rp. **16.769.068.418** dengan Program/Kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	99.450.000	85.770.000	86,24	APBD
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65.600.000	61.790.000	94,19	APBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	199.597.000	192.958.100	96,67	APBD
Total Anggaran SPM		364.647.000	340.518.100	92,36	
Total Anggaran PD		17.472.261.758	16.769.068.418	95,98	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		17.107.614.758	16.428.550.318	96,03	

Sumber data : BPBD Kab.Maros, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Kurangnya personil Satgas Bencana	Proses Pendataan Korban Bencana tidak berjalan dengan baik
2.	Penghitungan Kebutuhan	Jumlah Kerugian tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan	dibutuhkan orang yang berkompeten untuk menghitung jumlah kerugian dilapangan
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Anggaran Terbatas	Pemangku kepentingan harus memanfaatkan anggaran skala proiritas terkait pemenuhan SPM
4.	Pelaksanaan	Perubahan Anggaran 2024	Data yang diterima dari responden kurang lengkap
5.	Pelaporan	Kurangnya keterampilan atau pengalaman dalam pengumpulan data sehingga berdampak pada data yang di kumpulkan	Dibutuhkan tenaga yang professional dalam pengumpulan data
6.	Lain-lain		

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja sebesar **3,2836** dan status kinerja "**Sedang**" untuk LPPD Tahun 2023. EPPD untuk LPPD Tahun 2024 belum rilis dari Kementerian Dalam Negeri hingga RLPPD ini dimuat.

3.2. Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 45.A/LHP/XIX.MKS/0562025 Kabupaten Maros berhasil mendapatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 yang berarti pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros terlaksana dengan baik.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (*Konsolidasi*) Tahun 2026, realisasi pendapatan Kabupaten Maros tahun 2025 mencapai sebesar Rp. **1.632.749296.922,00** dan realisasi belanja daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 mencapai Rp. **1.606.569.628.197,80**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.632.749296.922,00	1.606.569.628.197,80	98,39
4.1	Pendapatan Asli daerah	389.125.437.604,00	357.552.278.630,80	91,88

4.2	Pendapatan Transfer	1.243.623.859.318,00	1.249.017.349.567,00	100,43
4.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0	0

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5	BELANJA DAERAH	1.676.072.147.239,00	1.534.136.516.664,44	91,53
5.1	Belanja Operasi	1.177.616.488.195,00	1.093.433.599.098,68	92,85
5.2	Belanja Modal	325.967.642.844,00	283.472.346.130,76	86,96
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.821.720.000	1.706.593.200	21,81
5.4	Belanja Transfer	164.666.296.200	155.523.978.235	94,44

Sumber : BPKAD, 2026

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Data Base Inovasi Daerah, Kabupaten Maros memiliki Inovasi Daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Badan Keuangan dan Asset Daerah	PAMANDA	Terkirim
2.	Bagian Hukum Setda	KASIHARAPANKEREN	Terkirim
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, perhubungan dan Pertanahan	SIAP JAKI	Terkirim
4.	Badan Pendapatan Daerah	MAKAMAJA	Terkirim
5.	Dinas KOMINFO	SI DATA SERU	Terkirim
6.	Dinas Kesehatan	MAKESSING	Terkirim
		KERETA SAKTI	Terkirim

	SILOGTA KEREN	Terkirim
	CEMANGI	Belum Dinilai
	CEK MAS PADANG	Belum Dinilai
	GERCEP TAS HERMES	Belum Dinilai
	GESIT LIAR	Belum Dinilai
	GESIT MENDEKATIMU	Belum Dinilai
	TANCAP JAROM	Belum Dinilai
	SALOME	Belum Dinilai
	PETIH SADIS	Belum Dinilai
	TERASI DI GOSOK	Belum Dinilai
	EDUKASI TEMUI BUFAS	Belum Dinilai
	P2 TB T4 MASKER	Belum Dinilai
	MC SEHAT	Belum Dinilai
	SANDARAN SI DIA	Belum Dinilai
	CODEINE	Belum Dinilai
	GERTU JANDA	Belum Dinilai/ Uji Coba
	PAKARESO	Belum Dinilai/ Uji Coba
	SI GURAME CEPER	Belum Dinilai/ Uji Coba
	CANTIK BUMILKU	Belum Lengkap
	SI POS MAPAKAINGE	Belum Lengkap
	SIBER TB	Belum Lengkap
	SOSIALISASI IBU PERI	Belum Lengkap

		ADA YUNI DI MAROS BARU	Belum Lengkap
		REMOT TB	Belum Lengkap
		SITA LALENG LISE'	Belum Lengkap
		BORMAS BESPREN	Belum Lengkap
		PAPA BUDE'TA	Belum Lengkap
		META BARIS	Belum Lengkap
		SELALU GOES	Belum Lengkap
		CATINTING	Belum Lengkap
		GOES LA BANG	Belum Lengkap
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OM DUK	Belum Lengkap
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	GENERASI	Belum Dinilai
9.	Dinas Perikanan	PANTAI MAROS	Belum Dinilai
10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian	GEMBIRA BERSEKOLAH	Inisiatif
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, Pengendalian Penduduk dan KB	KLINIK PPRG	Inisiatif
		WE CARE U	Inisiatif
12.	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Ketenagakerjaan	JEMPOL MANIZ	Belum Dinilai/ Uji Coba
13.	Satpol PP Damkar dan penyelamatan	WARGA SIAGA BRASTA DAHANA	Inisiatif
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SEKOLAH CERDAS TERINTEGRASI	Belum Dinilai/ Uji Coba

